



# Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

## Kajian Sektor Unggulan Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Metode Location Quotient

Yenni Del Rosa<sup>1</sup>, Nofri Yendra<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas<sup>1,2</sup>

*e mail* yennidelrosa01@gmail.com<sup>1</sup>,

*nofriyendra84@gmail.com*<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The purpose of the study was to identify the leading sectors as the leading sector in the city of Padang, the capital city of West Sumatra province, using the Location Quotient (LQ) method. The research data is in the form of secondary data, the type of ratio data, namely the GDP of the city of Padang in 2017-2021 according to the field of business (sector) based on the 2010 ADHB base year. The research population is 12 districts and 7 cities in the province of West Sumatra and the sample is the city of Padang determined by the purposive sampling technique. Processing and analyzing data using quantitative descriptive statistics. Based on the LQ analysis, the city of Padang in 2021 has 11 categories of business fields as its leading sectors as follows: 1) processing industry, 2) water supply, waste management and recycling, 3) transportation and warehousing, 4) information and communication, 5) services finance and insurance, 6) real estate, 7) corporate services, 8) government administration, defense and social security, 9) education services, 10) health services and social activities, 11) other services. Of the 11 categories of business fields, the company service sector has the highest LQ value as the leading sector with the largest contribution to GRDP.*

**Keywords :** *leading sector, Location Quotient (LQ) method*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian identifikasi sektor-sektor unggulan sebagai *leading sector* kota Padang ibu kota provinsi Sumatera Barat menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Data penelitian berupa data sekunder jenis data rasio yakni PDB kota Padang tahun 2017 – 2021 menurut lapangan usaha (sektor) berdasarkan ADHB tahun dasar 2010. Populasi penelitian 12 kabupaten dan 7 kota di provinsi Sumatera Barat serta sampelnya kota Padang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengolahan dan analisis data menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Berdasarkan analisis LQ kota Padang tahun 2021 mempunyai 11 kategori lapangan usaha sebagai sektor unggulannya sebagai berikut : 1) industri pengolahan, 2) pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, 3) transportasi dan pergudangan, 4) informasi dan komunikasi, 5) jasa keuangan dan asuransi, 6) real estate, 7) jasa perusahaan, 8) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, 9) jasa pendidikan, 10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 11) jasa lainnya. Dari 11 kategori lapangan usaha tersebut sektor jasa perusahaan mempunyai nilai LQ paling tinggi sebagai sektor unggulan yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB.

**Keywords :** *sektor unggulan, metode Location Quotient (LQ)*

## PENDAHULUAN

Pandemi *covid 19* sejak April 2019 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia (Heikkila, E.J, 2019 & Fodness, D., & Murray, 2017) tidak terkecuali kota Padang ibu kota provinsi Sumatera Barat. Tahun 2020 PDRB ADHB tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha kota Padang terkoreksi dari Rp 62.222.357.93 triliun tahun 2019 turun Rp 202 milyar (0.32%), tahun 2021 nilai PDRB ADHB tahun dasar 2010 kota Padang Rp 65.179471.01 triliun (BPS, 2021). Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 berdampak terhadap prospek ekonomi tahun 2022 di sektor jasa (Putra, D.A, 2019). Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 triwulan 1 tumbuh 3.92%, triwulan 2 berkontraksi -4.91%, triwulan 3 berkontraksi -2.87% dan triwulan 4 berkontraksi -2.23% dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 berkontraksi -1.60%. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi berkontraksi -0.16% triwulan 1 tapi triwulan 2 tumbuh 5.76% (BPS, 2021). Perekonomian Sumatera Barat selama ini ditopang oleh sektor pertanian 21.62%, sektor perdagangan 15.66%, transportasi dan pergudangan 10.70%. Sektor pertanian sebagai sektor unggulan yang menggerakkan perekonomian di desa/nagari (Kouftreros, Vonderembse, M & Jayaram, J., 2015) sementara di perkotaan/pedesaan terdapat potensi wisata yang bisa dikembangkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi (Fodness, D & Murray, 2017).

Kota Padang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 sebagai pusat pemukiman baru layak huni didukung oleh fasilitas sosial ekonomi dan budaya guna mencegah terjadinya urbanisasi di kota otonom terdekatnya (Edward, Mary E. 2017 ; McKee, David, L., Robert D.D & William H.L, 2015). Pembangunan ekonomi saat ini tidak lagi dikendalikan

dari pusat tapi diserahkan kepada daerah provinsi masing-masing kabupaten/kota sehingga daerah dituntut dapat mencari dan mengelola sumberdaya yang dimilikinya untuk pembangunan di daerahnya (Barro, R.J, 2000 ; Bolkova T.R & Dahs, A, 2018) sesuai UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Ranis, F ; Frances, S, 2014 ; Silver C ; Iwan, J., & Larry S, 2011) dan harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan sebagai sektor unggulan (Hunt, Diana, 2019), mampu mengatasi masalah yang dihadapi sesuai sasaran dan kebutuhan daerah (Kuklinski, A, 2015 ; Lesmann, C, 2012 & Sadri, 2016). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak hanya sampai di tingkat provinsi tapi sampai di tingkat desa (Elfindri dkk, 2019 & Sjafrizal, 2003) sesuai UU No.6 tahun 2014 sehingga perlu pengembangan teori ekonomi pembangunan, evaluasi eksternal potensi dan kendala, manajemen pembangunan daerah serta implikasi keuangan dan pendanaan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan (Sjafrizal, 2003 & Weis, John, 2015).

Pelaksanaan otonomi daerah harus mampu menemukan potensi dan *leading sector* yang dimiliki daerah di tingkat provinsi hingga desa sesuai *competitive advantage* (Porter, M.E, 2013). Nyatanya masih banyak daerah sulit menemukan potensi dan *leading sector* suatu daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara efektif dan efisien (Sjafrizal, 2013 & Kuncoro, M, 2012). Pertumbuhan ekonomi daerah sebuah proses pemerintah daerah dan masyarakat dalam

mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja dan perkembangan kegiatan ekonomi daerah (Binalty, A.O, 2012 ; Kukliski, 2015). Pertumbuhan ekonomi kota Padang tahun 2017-2021 masing-masing 6.23% ; 6.06% ; 5.65% ; -1.86% ; 3.66% rata-rata 3.95% dan pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 masing-masing 5.29% ; 5.14% ; 5.05% ; -1.60% ; 3.29% rata-rata 3.43% (BPS, 2022).

Pertumbuhan ekonomi kota Padang dan provinsi Sumatera Barat cukup berfluktuasi, tahun 2020 terkoreksi negatif sehingga pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum optimal dapat diterapkan. Setiap daerah memiliki masalah dalam pembangunan karena kemampuan daerah terbatas terutama masalah keuangan (Lewis, D.B & Jasmin,

C.2014 & Simanjuntak, R.A. 2019). Tujuan pembangunan daerah perlu skala prioritas yang ingin dicapai sesuai identifikasi sektor-sektor ekonomi potensial (Friedmann, J ; William A, 2016 ; Higgin, B. & Donald J.S, 2015). Kota Padang seharusnya memiliki sektor unggulan sebagai salah satu prioritas pembangunan provinsi Sumatera Barat dengan menetapkan skala priotas (Duggio, M, 2019 ; Kumar, A.S & Saroj, P.K.Johid & H.Takeshima, 2018). Berdasarkan PDRB ADHB tahun dasar 2010 kota Padang tahun 2020 penyumbang terbesar perekonomian provinsi Sumatera Barat Rp 62.222.357.93 triliun, setara 25.7% dari total PDRB 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat mencapai Rp 241.88 triliun seperti tabel 1 berikut.

**Tabel 1.**  
**Produk Domestik Bruto ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha**  
**Kota Padang Tahun 2017 - 2021**

No	Kategori Lapangan Usaha	PDRB ADHB				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2.797.501.84	3.002.163.84	3.305.458.66	3.364.559.79	3.445.829.45
2.	Pertambangan dan penggalian	1.697.158.83	1.841.354.72	2.010.262.17	2.004.431.29	2.104.666.25
3.	Industri pengolahan	7.628.654.38	7.560.605.38	7.333.271.78	7.388.00.53	7.673.879.73
4.	Pengadaan listrik dan gas	56.903.96	59.954.32	68.201.79	63.911.72	65.573.30
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	77.589.54	84.935.29	89.525,50	91.355,10	100.455.41
6.	Konstruksi	5.454.168.47	6.052.088.01	6.562.353,28	6.494.326.03	6.597.989.05
7.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	8.896.514.61	9.681.923.86	10.570.841.57	10.212.980.64	10.756.224.22
8.	Transportasi dan pergudangan	8.660.194.23	9.747.554.71	10.712.147.94	9.743.216.11	10.121.032.94
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	752.143.33	828.548.92	935.094.36	745.817.34	807.026.46
10	Informasi dan komunikasi	3.490.684.15	3.986.119.88	4.608.003.32	5.111.768.66	5.436.439.68
11	Jasa keuangan dan asuransi	2.831.269.55	2.958.919.73	3.097.277,70	3.200.672.33	3.678.271.15
12	Real estate	1.664.715.65	1.785.984.57	1.939.807.09	1.959.176.60	2.029.756.72
13	Jasa perusahaan	788.312.18	842.729.33	941.293.81	911.430.35	925.285.33
14	Administrasi pemerintahan pertahanan, jaminan sosial wajib	3.452.482.63	3.705.296.16	4.912.094.293	4.586.294.20	4.806.095.86
15	Jasa pendidikan	2.691.481.98	2.923.246.17	3.278.696.74	3.541.775.51	3.613.913.06

16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	811.578.11	907.592.29	1.018.850.75	1.175.913.07	1.256.254.69
17	Jasa lainnya	1.341.741.65	1.537.824.81	1.761.373.37	1.626.728.65	1.760.777.73
	PDRB	53.091.095.1	57.506.842.01	62.424.554.79	62.222.357.93	65.179.471.01

Sumber : BPS, 2022

Penelitian ini cukup urgen dilakukan karena adanya gap perubahan pertumbuhan sektoral dalam perekonomian sebagai sektor unggulan untuk dikembangkan guna merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Juga merancang strategi pengembangan wilayah yang tepat untuk menciptakan investasi yang kondusif guna menarik para investor ke kota Padang *pasca* pandemi *covid 19* karena kota Padang perlu inovasi dan improvisasi untuk mendatangkan *new local goverment revenue* fokus sektor unggulan sebagai *leading sector* yang berkontribusi terhadap PDRB.

Rumusan masalah penelitian bagaimanakah identifikasi sektor-sektor unggulan kota Padang provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* menggunakan metode *Location Quotient pasca* pandemi *covid 19*? Tujuan penelitian mengetahui identifikasi sektor-sektor unggulan kota Padang provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* menggunakan metode *Location Quotient pasca* pandemi *covid 19*.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam wilayah domestik atau jumlah hasil seluruh nilai barang/jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah (BPS, 2022). Menurut (Paul A.Samuelson ; William D.Nordhaus, 2009 & Mankiw, N.G, 2019) PDRB merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu menurut Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sehingga PDRB berperan penting menentukan pertumbuhan ekonomi (Paul A.Samuelson ; William D.Nordhaus,

2009 & Mankiw, N.G, 2019). PDRB yaitu produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri (milik WNI dan WNA) dalam suatu negara untuk menghasilkan barang/jasa dalam tahun tertentu (Paul A.Samuelson ; William D.Nordhaus, 2009 & Mankiw, N.G, 2019). Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP) yaitu nilai barang/jasa yang dihasilkan dalam negara atau di luar negeri yang dilakukan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara (Paul A.Samuelson ; William D.Nordhaus, 2009 & Mankiw, N.G, 2019). Pendapatan nasional dihitung dengan metode pengeluaran, produk neto dan pendapatan (Paul A.Samuelson ; William D.Nordhaus, 2009 & Mankiw, N.G, 2019).

Menurut *export basic model* pertumbuhan ekonomi daerah ditentukan oleh *competitive advantage* yang dimiliki daerah bersangkutan (Porter, M.E, 2013). Hipotesa *export basic model* dapat digunakan untuk penelitian penaksiran *multiplier effect* dan *shift share analysis*. Analisis *Location Quotient* (LQ) yakni model ekonomi basis sebagai *leading sector* pertumbuhan dan tingkat spesialisasi sektor ekonomi di wilayah sesuai ciri-cirinya laju pertumbuhan ekonomi tinggi dan keterkaitan antar sektor keterkaitan dengan nilai tambah tinggi (de Fretes, 2017). Analisis LQ merupakan perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi disuatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama secara nasional atau perbandingan terhadap suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar (Tarigan, 2014). Rumus  $LQ = (X_{ir}/X_r) / (X_{in}/X_n)$  dimana  $X_{ir}$  = sektor i di tingkat daerah,  $X_r$  = jumlah semua sektor di tingkat daerah,  $X_{in}$  = sektor i

ditingkat nasional dan  $X_n$  = jumlah semua sektor di tingkat nasional. Interpretasi nilai LQ sebagai berikut : 1)  $LQ > 1$  perlu ekspor produk pada sektor tersebut, 2)  $LQ < 1$  perlu impor produk pada sektor tersebut, 3)  $LQ = 1$  adanya keseimbangan produktivitas. Tujuan penggunaan metode LQ untuk identifikasi sektor unggulan (basis) dan non basis suatu wilayah (Miller, 2011) dengan metode survei langsung atau tidak langsung (Ron, Hood, 1998).

Perluasan *export basic model* menambahkan hubungan ekonomi antar wilayah sebagai *interregional income model* dan ekspor ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah (McKee, D.L., Robert D.D & William H.L, 2015). Pada *interregional income model* dimasukkan unsur pemerintah berupa penerimaan, pengeluaran pemerintah dan investasi (Lewis, D.B, 2014). Menurut model neo klasik, pertumbuhan ekonomi daerah ditentukan oleh kemampuan daerah meningkatkan kegiatan produksi, mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah (Mankiw, N.Gregory, 2019) dengan formulasi persamaan *Cobb Douglas*. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja karena penambahan penduduk daerah dan imigrasi (McCann, Philip, 2011) sehingga terjadi ketimpangan pembangunan regional di daerah maju dan pembangunan regional kurang *convergence* (Sjafrizal, 2013).

*Comulative causation model* tidak yakin pemerataan pembangunan antar daerah dicapai dengan mekanisme pasar sehingga ketimpangan regional terus meningkat (Kuklinski, Antoni, 2019). Ketimpangan regional tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar tapi melalui kebijakan pemerintah yang intensif (Armstrong, H & Jim Taylor, 2017 ; Higgin, Benyamin & Donald J.S, 2015) Tendensi ketimpangan regional

cenderung turun dan cenderung tinggi (Friedmann, John & William Alonso, 2016) sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan mengatasi ketimpangan regional (Armstrong, H & Jim Taylor, 2017). Tendensi ketimpangan *divergence* perlu kebijakan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan tendensi ketimpangan *convergence* perlu kebijakan pembangunan berorientasi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (Hunt, Diana 2019 & Sjafrizal, 2008).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan menggali pengetahuan dan pemahaman fenomena komtemporer historik yang sudah diketahui tapi belum diterapkan dengan analisis secara sistemik (Cooper, Donal R., Pamela S.C, 2011 & Sekaran, 2015). Penelitian ini menggunakan data sekunder jenis rasio bersumber dari *library research* berhubungan dengan masalah penelitian. Populasi penelitian provinsi Sumatera Barat terdiri 12 kabupaten, 7 kota dan sampel penelitian kota Padang ditentukan secara *purposive sampling* (Cooper, Donal R., Pamela S.C, 2011 & Sekaran, 2015).

Variabel penelitian PDRB dan sektor unggulan berupa simbol angka (Cooper, Donal R., Pamela S.C, 2011 & Sekaran, 2015). Metode analisis data secara statistik deskriptif kuantitatif bertujuan mengeksplor berbagai fenomena sekelompok unit analisis dengan membuat kesimpulan melalui data populasi atau sampel sehingga mudah dipahami (Cooper, Donal R., Pamela S.C, 2011 & Sekaran, 2015). Sektor unggulan kota Padang menggunakan metode *Location Quotient* (Dean, R., William, H.L & David, M.Knee, 2010) dengan formulasi

$$(LQ) = \frac{PDRB_{m,i} / \sum PDRB_m}{TPDRB_{sb,i} / \sum PDRB_{sb}}$$

Metode LQ penyelesaiannya cukup mudah tapi memiliki keterbatasan menyangkut wilayah penelitian yang tidak jelas (Hendayana, 2003). Asumsi metode LQ penduduk di wilayah bersangkutan mempunyai pola permintaan wilayah sama dengan pola permintaan wilayah acuan dan permintaan wilayah sebuah barang akan dipenuhi terlebih dahulu oleh produksi wilayah, kekurangannya diimpor dari wilayah lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Perekonomian Kota Padang

Membatkannya penanganan pandemi *covid 19* secara nasional tahun 2021 berimplikasi membaiknya kinerja

ekonomi secara nasional dengan indikator PDRB menurut berbagai lapangan usaha. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kota Padang 3.14%, inflasi 0.15%, pengangguran terbuka 13.30 % dari angkatan kerja. Tingkat kemiskinan 4.43% dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 82.60% sehingga kota Padang berpotensi dapat dikembangkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi *covid 19*. Tahun 2020 PDRB ADHB tahun dasar 2010 kota Padang menurut lapangan usaha seperti tabel 2 penyumbang ekonomi terbesar di provinsi Sumatera Barat Rp 62.222.357.93 triliun setara 25.7% dari total PDRB 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat Rp 241.88 triliun.

**Tabel 2.**

### Produk Domestik Bruto ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Padang Tahun 2017 – 2021

No	Kategori Lapangan Usaha	PDRB ADHB				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian,kehutanan dan perikanan	2.797.501.84	3.002.163.84	3.305.458.66	3.364.559.79	3.445.829.45
2.	Pertambangan dan penggalian	1.697.158.83	1.841.354.72	2.010.262.17	2.004.431.29	2.104.666.25
3.	Industri pengolahan	7.628.654.38	7.560.605.38	7.333.271.78	7.388.000.53	7.673.879.73
4.	Pengadaan listrik dan gas	56.903.96	59.954.32	68.201.79	63.911.72	65.573.30
5.	Pengadaan air,pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	77.589.54	84.935.29	89.525.50	91.355.10	100.455.41
6.	Konstruksi	5.454.168.47	6.052.088.01	6.562.353.28	6.494.326.03	6.597.989.05
7.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	8.896.514.61	9.681.923.86	10.570.841.57	10.212.980.64	10.756.224.22
8.	Transportasi dan pergudangan	8.660.194.23	9.747.554.71	10.712.147.94	9.743.216.11	10.121.032.94
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	752.143.33	828.548.92	935.094.36	745.817.34	807.026.46
10.	Informasi dan komunikasi	3.490.684.15	3.986.119.88	4.608.003.32	5.111.768.66	5.436.439.68
11.	Jasa keuangan dan asuransi	2.831.269.55	2.958.919.73	3.097.277.70	3.200.672.33	3.678.271.15
12.	Real estate	1.664.715.65	1.785.984.57	1.939.807.09	1.959.176.60	2.029.756.72
13.	Jasa perusahaan	788.312.18	842.729.33	941.293.81	911.430.35	925.285.33
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib	3.452.482.63	3.705.296.16	4.192.094.296	4.586.294.20	4.806.095.86
15.	Jasa pendidikan	2.691.481.98	2.923.246.17	3.278.696.74	3.541.775.51	3.613.913.06
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	811.578.11	907.592.29	1.018.850.75	1.175.913.07	1.256.254.69
17.	Jasa lainnya	1.341.741.65	1.537.824.81	1.761.373.37	1.626.728.65	1.760.777.73
PDRB		53.091.095.10	57.506.842.01	62.424.554.79	62.222.357.93	65.179.471.01

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan tabel 2 tahun 2021 PDRB berdasarkan ADHB 2010 kota Padang Rp 65.179.471.01 naik Rp 2.957.113.8 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 62.222.357.93. Naiknya PDRB ADHB 2010 dipengaruhi oleh kenaikan produksi di semua lapangan usaha karena inflasi. Tahun 2019 dan 2020 pertumbuhan ekonomi kota Padang turun masing-masing 5.65% dan -1.86% berdampak terhadap semua lapangan usaha kota Padang. Tahun 2021 struktur ekonomi kota Padang didominasi oleh 6 lapangan usaha sebagai berikut : 1) industri pengolahan, 2) konstruksi, 3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 4) informasi dan komunikasi, 5) jasa keuangan dan asuransi, 6) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Peran 17 kategori lapangan usaha dalam pembentukan PDRB ADHB 2010 kota Padang tahun 2019-2021 laju pertumbuhan lapangan usaha pengolahan 11.80%, konstruksi 10.36%, transportasi dan pergudangan 16.12%, informasi dan komunikasi 7.98% serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 7.15%. Lapangan usaha informasi dan komunikasi serta jasa keuangan dan asuransi naik signifikan. Tahun 2021 struktur perekonomian kota Padang didominasi oleh 6 lapangan usaha seperti 1) industri pengolahan, 2) konstruksi, 3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 4) informasi dan komunikasi, 5) jasa keuangan dan asuransi, 6) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

### **Gambaran Umum Perekonomian Provinsi Sumatera Barat**

Tahun 2020 kinerja ekonomi provinsi Sumatera Barat cukup baik karena semua lapangan usaha perlambatannya signifikan (perlambatan tertinggi kabupaten Padang Pariaman - 10.46% dan terendah kabupaten Pasaman

-0.87%. Menurut (BPS, 2021) kota Padang laju pertumbuhan ekonomi positif, tertinggi kabupaten Pasaman Barat 3.75% dan terendah kabupaten Padang Pariaman 2.18%. Ibukota provinsi Sumatera Barat kota Padang perlambatan kinerja ekonominya cukup baik. Tahun 2022 perlambatan pertumbuhan ekonomi kota Padang - 1.86% dari 5.65% tahun 2019 dan tahun 2021 sebesar 3.66%. Tahun 2021 kontribusi PDRB ADHB kota Padang terhadap provinsi Sumatera Barat 25.72% atau Rp 65.18 triliun terhadap total PDRB Sumatera Barat Rp 241.99 triliun.

Tahun 2020 dan 2021 ada 4 sektor utama pembentuk PDRB kota Padang yakni sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 16.50% (tahun 2020 sebesar 16.41%), sektor transportasi dan pergudangan 15.53% (tahun 2020 sebesar 10,37%). Keempat sektor ini menyumbang 53.92% dari total PDRB kota Padang tahun 2021 (tahun 2020 sebesar 54.33%) sekaligus sebagai sektor yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB provinsi Sumatera Barat. Tahun 2021 PDRB berdasarkan ADHB 2010 kota Padang Rp 65.179.471.01 naik Rp 2.957.113.8 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 62.222.357.93. Naiknya PDRB ADHB 2010 karena kenaikan produksi di semua lapangan usaha dan inflasi. Tahun 2019 dan 2020 pertumbuhan ekonomi kota Padang turun masing-masingnya 5.65% dan -1.86% sehingga berdampak terhadap semua lapangan usaha dan sektor unggulan kota Padang. Kinerja ekonomi provinsi Sumatera Barat secara total tahun 2022 diprediksi meningkat karena meningkatnya permintaan global maupun domestik dari sisi permintaan konsumsi rumah tangga dan investasi serta perbaikan net ekspor.

Tahun 2020 PDRB ADHB tahun dasar 2010 provinsi Sumatera Barat

menurut lapangan usaha seperti tabel 3 kota Padang penyumbang perekonomian terbesar di provinsi Sumatera Barat berdasarkan PDRB ADHB tahun 2010 sebesar Rp 62.222.357.93 triliun setara

25.7% dari total PDRB 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat Rp 241.88 triliun. Kinerja ekonomi provinsi Sumatera Barat per kategori lapangan usaha seperti tabel

**Tabel 3.**  
**Produk Domestik Regional Bruto ADHB 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 – 2021**

No	Kategori Lapangan Usaha	PDRB ADHB				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	50.492.015.02	53.388.370.09	54.468.270.28	54.117.759.09	54.873.393.68
2.	Pertambangan dan penggalian	9.138.553.46	9.832.802.96	10.576.705.18	10.340.461.15	10.608.551.36
3.	Industri pengolahan	20.835.165.13	20.967.693.16	20.617.888.10	20.910.618.76	22.261.995.50
4.	Pengadaan listrik dan gas	240.385.53	259.098.03	263.753.97	248.983.83	259.390.75
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	197.019.60	208.775.32	222.769.91	221.081.47	236.143.14
6.	Konstruksi	20.008.574.41	22.219.271.09	24.810.569.29	24.664.988.83	25.771.425.41
7.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	31.888.828.33	35.296.943.32	38.823.319.91	38.155.311.05	39.861.326.16
8.	Transportasi dan pergudangan	27.068.214.82	29.183.861.43	30.982.230.77	25.274.518.11	26.021.543.49
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2.835.449.20	3.146.008.36	3.509.548.64	2.994.213.53	3.216.343.52
10.	Informasi dan komunikasi	11.302.704.39	12.611.224.72	14.279.966.65	15.553.897.07	16.722.398.48
11.	Jasa keuangan dan asuransi	6.627.783.02	6.929.655.67	7.153.612.99	7.349.374.53	8.288.301.26
12.	Real estate	4.219.482.99	4.513.529.17	4.941.486.65	4.993.084.47	5.181.421.34
13.	Jasa perusahaan	922.959.07	1.002.378.39	1.093.577.49	1.069.427.59	1.087.613.84
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	12.467.324.08	13.642.393.76	15.077.263.18	16.252.184.96	17.427.390.05
15.	Jasa pendidikan	8.843.846.16	9.684.924.22	10.698.965.12	11.391.664.96	11.722.185.17
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2.856.972.06	3.194.777.42	3.501.720.89	3.930.068.80	4.275.490.58
17.	Jasa lainnya	3.944.582.99	4.447.105.55	4.928.088.15	4.545.891.14	4.934.582.99
	<b>PDRB</b>	<b>213.889.860.25</b>	<b>230.528.812.66</b>	<b>245.949.737.17</b>	<b>241.993.529.11</b>	<b>252.749.645.35</b>

Sumber : BPS, 2022

### Penentuan Sektor Unggulan Kota Padang

Penentuan komoditas unggulan suatu daerah merupakan langkah awal meraih keunggulan komparatif dan kompetitif

secara efisiensi menghadapi globalisasi perdagangan. Efisiensi dilakukan menggunakan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif ditinjau dari *supply* dan *demand*. Dari sisi



*supply*, komoditas unggulan dicirikan oleh superioritas pertumbuhan sosial ekonomi untuk meningkatkan pendapatan. Dari sisi *demand*, komoditas unggulan dicirikan tingginya permintaan di pasar domestik dan internasional.

Sektor unggulan berkontribusi besar terhadap PDRB dibandingkan dengan sektor yang sama ditingkat regional atau nasional. Hasil perhitungan analisis LQ masing-masing lapangan usaha kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat seperti tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient dan Potensi Ekonomi Kota Padang Tahun 2017 – 2021**

No	Kategori Lapangan Usaha	Indeks Location Quotient									
		2017	Ket.	2018	Ket.	2019	Ket.	2020	Ket.	2021	Ket.
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	0.22	Bukan sektor unggulan	0.23	Bukan sektor unggulan	0.24	Bukan sektor unggulan	0.24	Bukan sektor unggulan	0.24	Bukan sektor unggulan
2.	Pertambangan dan penggalian	0.75	Bukan sektor unggulan	0.75	Bukan sektor unggulan	0.75	Bukan sektor unggulan	0.75	Bukan sektor unggulan	0.77	Bukan sektor unggulan
3.	Industri pengolahan	1.48	Sektor unggulan	1.45	Sektor unggulan	1.40	Sektor unggulan	1.37	Sektor unggulan	1.34	Sektor unggulan
4.	Pengadaan listrik dan gas	0.95	Bukan sektor unggulan	0.93	Bukan sektor unggulan	1.02	Sektor unggulan	1.00	Bukan sektor unggulan	0.98	Bukan sektor unggulan
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1.59	Sektor unggulan	1.63	Sektor unggulan	1.58	Sektor unggulan	1.61	Sektor unggulan	1.65	Sektor unggulan
6.	Konstruksi	1.10	Sektor unggulan	1.09	Sektor unggulan	1.04	Sektor unggulan	1.03	Sektor unggulan	0.99	Bukan sektor unggulan
7.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	1.12	Sektor unggulan	1.10	Sektor unggulan	1.07	Sektor unggulan	1.04	Sektor unggulan	0.99	Bukan sektor unggulan
8.	Transportasi dan pergudangan	1.29	Sektor unggulan	1.34	Sektor unggulan	1.09	Sektor unggulan	1.50	Sektor unggulan	1.51	Sektor unggulan
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.09	Sektor unggulan	1.06	Sektor unggulan	1.05	Sektor unggulan	0.97	Bukan sektor unggulan	0.97	Bukan sektor unggulan
10	Informasi dan komunikasi	1.24	Sektor unggulan	1.27	Sektor unggulan	1.28	Sektor unggulan	1.28	Sektor unggulan	1.26	Sektor unggulan
11	Jasa keuangan dan asuransi	1.72	Sektor unggulan	1.71	Sektor unggulan	1.71	Sektor unggulan	1.69	Sektor unggulan	1.72	Sektor unggulan

No	Kategori Lapangan Usaha	Indeks Location Quotient									
		2017	Ket.	2018	Ket.	2019	Ket.	2020	Ket.	2021	Ket.
12	Real estate	1.59	Sektor unggulan	1.59	Sektor unggulan	1.55	Sektor unggulan	1.53	Sektor unggulan	1.52	Sektor unggulan
13	Jasa perusahaan	3.44	Sektor unggulan	3.37	Sektor unggulan	3.39	Sektor unggulan	3.32	Sektor unggulan	3.30	Sektor unggulan
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.12	Sektor unggulan	1.09	Sektor unggulan	1.09	Sektor unggulan	1.00	Sektor unggulan	1.07	Sektor unggulan
15	Jasa pendidikan	1.23	Sektor unggulan	1.21	Sektor unggulan	1.21	Sektor unggulan	1.21	Sektor unggulan	1.19	Sektor unggulan
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.14	Sektor unggulan	1.14	Sektor unggulan	1.15	Sektor unggulan	1.16	Sektor unggulan	1.14	Sektor unggulan
17	Jasa lainnya	1.37	Sektor unggulan	1.39	Sektor unggulan	1.41	Sektor unggulan	1.39	Sektor unggulan	1.38	Sektor unggulan
Total		11.61	-	11.44	-	11.51	-	11.40	-	11.33	-

Sumber : Data Diolah, 2022

Sesuai tabel 4 kota Padang tahun 2017-2021 mempunyai 14 lapangan usaha sebagai sektor unggulan sebagai berikut : 1) industri pengolahan, 2) pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, 3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, 4) transportasi dan pergudangan, 5) informasi dan komunikasi, 6) jasa keuangan dan asuransi, 7) real estate, 8) jasa perusahaan, 9) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, 10) jasa pendidikan, 11) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 14) jasa lainnya. Jasa perusahaan mempunyai nilai LQ paling tinggi sebagai sektor unggulan paling besar kontribusinya terhadap PDRB. Tahun 2021 kota Padang mempunyai 11 lapangan usaha sebagai sektor unggulannya sebagai berikut : 1) industri pengolahan, 2) pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, 3) transportasi dan pergudangan, 4) informasi dan komunikasi, 5) jasa keuangan dan asuransi, 6) real estate, 7)

jasa perusahaan, 8) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, 9) jasa pendidikan, 10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 11) jasa lainnya. Jasa perusahaan tetap mempunyai nilai LQ paling tinggi sehingga dianggap sebagai sektor unggulan yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB

## SIMPULAN

Simpulan berdasarkan analisis LQ kota Padang pasca pandemi *covid 19* ada 11 lapangan usaha sektor unggulan sebagai berikut : 1) industri pengolahan, 2) pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, 3) transportasi dan pergudangan, 4) informasi dan komunikasi, 5) jasa keuangan dan asuransi, 6) real estate, 7) jasa perusahaan, 8) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, 9) jasa pendidikan, 10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 11) jasa lainnya. Lapangan usaha jasa perusahaan tetap nilai LQ paling tinggi

sebagai sektor unggulan yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB.

Saran sesuai hasil penelitian untuk meningkatkan PDRB kota Padang dan provinsi Sumatera Barat pada berbagai lapangan usaha sebagai sektor unggulan perlu persamaan persepsi, visi dan misi terhadap perkembangan pembangunan ekonomi. Pemerintah hendaknya membuat *site plan* dan pola per wilayah sektor unggulan secara konsisten.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Kym & Richard Blackhurst. 1993. *Regional Integration and Global Trading System*. New York : Harvester Wheatsheaf.
- Armstrong, H dan Jim Taylor. 2007. *Regional Economics and Policy. Third Edition*. Brighton : Harvester Wheatsheaf.
- Atkinson, R.D & Stephan, J.E. 2012. *Innovation of Economic : The Race for Global Advantage Connecticut*. New York : Yale University Pres.
- Azhari, Gito, Mohd.N.S, Ishak Hasan & M.Shabri A.M. 2017. The Role of Cooperative in the Indonesian Economy. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*. Vol.6(10). pp. 43-49.
- Bharadwaj, B. 2012. Roles of Cooperarative Societies in Poverty Reduction : A Case of Nepal. *Administration and Management Review*. Vol. 24(1 ). pp. 120-139.
- Blair, John, P. 1991. *Urban and Regional Economics*. Homewood Illinois : Irwin Co.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Sumatera Barat Dalam Angka 2020. Padang. BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Kota Padang Dalam Angka 2020. Padang : BPS.
- Barro,R.J.2000. Inequality and Growth in a Panel of Countries. *Journal of Economic Growth*. 5(1). pp. 5-32. <https://doi.org/10.102/A:1009850119329>
- Binalti, A.O. 2012. Growth and Income Equality : A Comparative Analysis. *Economics Research International*. 12(2). pp. 1-7. <https://doi.org/10.1155/2012/569890>.
- Boikova, T., & Dahs, A. 2018. Inequality and Economics Growth Across Countries of the Eurozone. *International Journal of Sustainable Economy*. 10(4). pp. 315. <https://doi.org/10.1504/IJSE.2018.095254>.
- Cooper, Donald R., & Pamela S.Schindler. 2011. *Business Research Methods. 11<sup>th</sup> ed*. New York : Mc Graw-Hill Companies Inc.
- Dean, R., William H, L., & David McKee. 2010. *Spatial Economic Theory*. New York : The Free Press.
- De Fretes, P.N. 2017. Analisis Sektor Unggulan (LQ), Struktur Ekonomi (Shift Share) dan Proyeksi PDRB Provinsi Papua 2018. *Jurnal Development*. 1(2). pp.21-40.
- Duggio, M. 2019. The Influence of Cooperative Development on Economic Performance Welfare of Society in Bali Province. *Journal of Economics and Finance*. 7(5). pp. 28-38.
- Dunn, Edgar, S, Jr. *The Equilibrium of Land Use Pattern in Agriculture*. New York : The Free Press.

- Edward, Mary E. 2017. *Regional and Urban Economics and Economics Development : Theory and Methods*. German : Duke University Press.
- Elfindri, Hendro E. & Zamzami. 2019. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Surabaya : Rajagrafindo Persada.
- Fodness, D & Murray. 2017. Tourist Information Search. *Journal Analisis of Tourism Research*. Vol 3. pp. 503-523.
- Fiedmann, J & William, A. 2016. *Regional Policy : Readings in Theory and Applications*. Cambridge : The M.I.T. Press.
- Gopalakrisnan, S., & Damanpour, F. 2017. A Review of Innovation Research in Economic, Sociology and Technology Management. *Omega*. 25 (1). pp. 15-28.
- Heikkila, E.J. 2019. *The Economic of Planning, Center for Urban Policy Research*. New Yersey : The Free Press.
- Higgins, Benyamin and Donal J.Savoie. 1999. *Regional Development Theories & Their Application*. New York Brunswick : Transaction Publisher.
- Hunt, Diana, 2019. *Economics Theories of Development : An Analysis of Competing Paradigms*. New York : Harvester Wheatsheaf.
- Koufteros, X., Vonderembse, M., & Jayaram. 2015. Integral and External Integration for Product Development : The Contingency Effects of Uncertainty, Equivocality and Platform Strategy. *Decision Sciences*. 36(1). pp. 97-133.
- Kukliski, Antoni. 2015. *Regional Disagregation of National Policies and Plans*. Paris : Mouton & Co.
- Kumar, A.,S.Saroj, P.K Joshi and H.Takeshima. 2018. Does Cooperative Membership Improve Household Welfare? Evidence from a Panel Data Analysis of Smallholder Dairy Farmers in Bihar India. *International Food Policy Research Institute*. Vol.75. pp. 24-36.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Analisis Spasial dan Regional : Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit AMP YKPN.
- Lessmann, C. 2012. Regional Inequality and Decentralization : An Empirical Anaysis, Environment and Planning. *Economy and Space*. 44(6). pp. 1363-1388. <https://doi.org/10.1068/a44267>
- Lewis, D.B. & Jasmin C. 2014. Central Development Spending in Regions : Post Decentralization. *BIES*. 40(3). pp. 379-394.
- Mankiw, N.Gregory. 2019. *Essential of Economics*. 9<sup>th</sup> ed. Boton : Cengage Learning.
- McKee, David, L., Robert D.D & William H.L. 2015. *Regional Economics : Theory and Practice*. New York : The Free Press.
- McCann, Philip.2011. *Urban and Regional Economics*. USA : Oxford University Press.
- Miller, M. 2011. Location Quotient Basic Tool for Economic Development Analysis. *Economic Development Review*. Volume 9(2). pp. 65-81.
- Potter, M.E. 2010. *The Competitive Advantage of Nation*. London : The Mac Millan Pres.Ltd.

- Putra, D.A. 2019. Sektor Jasa Masih Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3889389/sektor-jasa-masih-jadi-pendorong-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>.
- Ranis, G & Frances S. 2014. Decentralization in Indonesia. *BIES*. 30(10). pp. 32-47.
- Riza, Fathia Rahmi. 2015. Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang. <http://scholar.unand.ac.id/629/1/21>
- Ron, Hood. 1998. *Economic Analysis : A Location Quotient*. Primer Principal Sun Region. Associates, Inc.
- Samuelson & William D.Nordhaus. 2009. *Macroeconomics*. New York : McGraw Hill.
- Sekaran, Uma. 2015. *Research Methods for Business. Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Silver, C, Iwan J.A & Larry, S. 2010. Intergovernmental Transfers and Decentralization in Indonesia. *BIES*. 37. pp. 345-362.
- Simanjuntak, R.A. 2019. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. *Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Platform Untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Padang, 15 April 2019.
- Sjafrizal. 2003. Regional Autonomy Impacts : The Case of West Sumatera. *Paper Presented in the 3<sup>rd</sup> Indonesian Regional Science Association International Conference*. Jakarta 20-21 Maret 2003.
- Sjafrizal. 2018. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang : Baduose Media.
- Sjafrizal. 2014. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, Robinson. 2015. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi*. Cetakan Ketujuh. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Otonomi Desa.
- Weis, John. 2015. *Economic Policy in Developing Countries : The Reform Agenda*. New York : Prentice Hall.